



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007
TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan dalam Peraturan Presiden tersebut perlu diperjelas untuk menghindari kekeliruan penafsiran;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2A

- (1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru."

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan, dan perubahannya apabila ada."

3. Lampiran I mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk penanaman modal diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
4. Lampiran II Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan diubah, sehingga seluruh Lampiran II tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 111 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|------------|--|-------------|---------------------------|
| 1 | Perjudian/Kasino | 92429 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, pertilasan, bangunan kuno, dsb) | 92323 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | Museum Pemerintah | 92321 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 4 | Pemukiman/Lingkungan Adat | 92323 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 5 | Monumen | 92324 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 6 | Objek Ziarah (tempat, peribadatan, pertilasan, makam, dsb) | 92439 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 7 | Pemanfaatan (pengambilan) Koral Alam | 01501 | Kehutanan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|-----|---|-------|----------------------------|
| 8 | Penangkapan Spesies Ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES | 05011 | Kelautan dan Perikanan |
| 9 | Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit | 64223 | Komunikasi dan Informatika |
| 10 | Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi | 92131 | Komunikasi dan Informatika |

11 Penyediaan ...

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|-----|--|-------|-------------|
| 11 | Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Darat | 63310 | Perhubungan |
| 12 | Penyelenggaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang | 63390 | Perhubungan |
| 13 | Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor | 63390 | Perhubungan |
| 14 | Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 63390 | Perhubungan |
| 15 | Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | 63321 | Perhubungan |
| 16 | Vessel Traffic Information System (VTIS) | 62321 | Perhubungan |
| 17 | Pemanduan Lalu Lintas Udara | 63330 | Perhubungan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|-----|---|-------|---------------|
| 18 | Industri Bahan Kimia yang dapat Merusak Lingkungan, seperti : Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro Fluoro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform, Halon, dan lainnya | 24212 | Perindustrian |
| 19 | Industri Bahan Kimia Skedul-I Konvensi Senjata Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, dll) | 24119 | Perindustrian |
| 20 | Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan minuman mengandung Malt) | 15510 | Perindustrian |
| 21 | Industri Pembuat Chlor Alkali dengan bahan mengandung Merkuri | 24111 | Perindustrian |
| 22 | Industri Siklamat dan Sakarin | 24119 | Perindustrian |
| 23 | Budidaya Ganja | 01119 | Pertanian |

Catatan: ...

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

persetujuan dari sektor yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.

2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 111 TAHUN 2007

TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan

a. Dicadangkan untuk UMKMK

| N0 | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|-----------|--|-------------|--------------------------------|
| 1 | Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil (s/d 10 MW) | 40101 | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | Agen Perjalanan Wisata | 63420 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | Sanggar Seni | 92142 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 4 | Usaha Jasa Pramuwisata | 63430 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 5 | Pengusahaan Hutan Tanaman lainnya (Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis, dll) | 02039 | Kehutanan |
| 6 | Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam | 02052 | Kehutanan |
| 7 | Industri Kayu Gergajian (Kapasitas Produksi sampai dengan 2000M ³ /Tahun) | 20101 | Kehutanan |
| 8 | Industri Primer Pengolahan Rotan | 20104 | Kehutanan |
| 9 | Industri Barang Setengah Jadi dari Kayu Bakau: | | Kehutanan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| N0 | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|--------|
| | Industri Kerajinan Ukir-ukiran kecuali Mebeller | 20293 | |
| | Industri Alat-alat Dapur | 20294 | |
| | Industri Barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain | 20299 | |

10 Industri ...

| | | | |
|----|--|-------|----------------------------|
| 10 | Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu lainnya (Getah Pinus, Bambu, Minyak Atsiri) | 02059 | Kehutanan |
| 11 | Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam | 01501 | Kehutanan |
| 12 | Perikanan Tangkap dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 30 GT, di wilayah perairan sampai dengan 12 mil atau kurang. | 05011 | Kelautan dan Perikanan |
| 13 | Penangkapan Ikan di Perairan Umum | 05031 | Kelautan dan Perikanan |
| 14 | Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian/Pengekstaksian, Pengolahan Surimi dan Jelly Ikan | 15129 | Kelautan dan Perikanan |
| 15 | Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi | 92132 | Komunikasi dan Informatika |
| 16 | Perusahaan Jasa Kurir/Jasa Titipan (Golongan Kecil): Kirim Mengirim Barang Cetak | 64130 | Komunikasi dan Informatika |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| N0 | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------------------------|-------------------------------|
| | Surat Kabar Bungkusan Kecil Paket Pengiriman Uang | | |
| 17 | Jasa Telekomunikasi meliputi: Warung Telekomunikasi Warung Internet Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung | 64314 64325 64319 | Komunikasi dan Informatika |
| 18 | Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) Golongan Kecil: Pekerjaan Galian, Pemandangan dan Timbunan Tanah | 45100 | Pekerjaan Umum |

| Pekerjaan ... | | |
|---|-------|--|
| Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan | 45100 | |
| Pekerjaan Perancah dan Bekisting | 45243 | |
| Pekerjaan Pembongkaran | 45100 | |
| Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Gedung Bertingkat lebih dari dua lantai | 45211 | |
| Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Gudang atau Industri Pabrik | 45213 | |
| Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Komersial | 45214 | |
| Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum | 45218 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-----------------|--------|
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan sejenisnya | 45217 | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan | 45216 | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan | 45215 | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Kereta Api, dan Landasan Pacu Pesawat Terbang | 45221/ 45222 | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Jalan Bawah Tanah | 45221/ 45223 | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Saluran Air, Pelabuhan, Bendungan dan Bangunan Air lainnya | 45224 | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk jalur pipa air transmisi, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel) | 45328 | |

| | | | |
|--|---|-------|---------------|
| | Pekerjaan Konstruksi untuk jaringan pipa dan kabel distribusi, dan jaringan pelayanan | 45328 | Pekerjaan ... |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk sarana Olah Raga dan Rekreasi | 45218 | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Stadion dan Lapangan Olah Raga | 45218 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|--------|
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Prasarana Olah Raga dan Rekreasi lainnya (seperti kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf) | 45218 | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan rekayasa lainnya | 45229 | |
| | Perakitan dan Pemasangan Bangunan Pracetak | 45245 | |
| | Pekerjaan Pondasi termasuk Pemancangan Tiang Pancang | 45241 | |
| | Pekerjaan Pembesian | 45221 | |
| | Pekerjaan Konstruksi per-pipa-an Gas | 45314 | |
| | Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran | 45315 | |
| | Pekerjaan Konstruksi Sistim Alarm Pencurian | 45315 | |
| | Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator | 45316 | |
| | Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran dengan Operator | 45500 | |
| | Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan | 00000 | |
| | Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan untuk satu atau dua lantai Bangunan Bertingkat | 45211 | |
| | Pembuatan Sumur Air | 45242 | |
| | Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran: | | |
| | Pekerjaan Beton | 00000 | |
| | Pekerjaan Pasangan Batu Kali | 00000 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--------------|------|--------|
|----|--------------|------|--------|

Pekerjaan ...

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| | Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya: Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, Ventilasi, dan Pengatur Suhu Udara Pekerjaan Plumbing (Pekerja Drain, termasuk menyiapkan pembuangan air kotor) Pekerjaan Pemasangan Kabel dan Fitting Listrik Pekerjaan Konstruksi Antena Perumahan Pekerjaan Konstruksi Listrik lainnya Pekerjaan Isolasi (Kabel Listrik, Air, Pemanas, Suara) Pekerjaan Konstruksi Pagar Pekerjaan Instalasi lainnya Pekerjaan Instalasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Pengecatan Pekerjaan Pemasangan Keramik/ Marmer Dinding dan Lantai Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai lainnya Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam Pekerjaan Dekorasi Interior | 45317 45311 45312 45313 45311 45315 45316 45319 45319 45401 45403 45403 45402 45402 00000 00000 | Pekerjaan Umum |
|--|--|--|----------------|



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

| N0 | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|----------------|----------------|
| | Pekerjaan Ornamen Pekerjaan Akhir dan Perapihan lainnya | 00000 45409 | |
| 19 | Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Kecil: Jasa Pra Desain dan Konsultasi Arsitektur Jasa Desain Arsitektur | 74210 74210 | Pekerjaan umum |

| | | | |
|--|--|---|----------------|
| | Jasa Administrasi Kontrak Jasa Desain Arsitektur dan Administrasi Kontrak Jasa Arsitektur lainnya Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur Bangunan Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Instalasi lainnya Jasa Rekayasa lainnya | 74210 74210 74210 74210 74210 74210 74210 | Jasa ... |
| | Jasa Rekayasa Terpadu dan Manajemen Proyek Pekerjaan Air dan Sanitasi dengan Sistem Terima Jadi Jasa Rekayasa Terpadu untuk Konstruksi Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi | 74210 74210 | Pekerjaan Umum |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| N0 | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|---|-------------|
| | Jasa Rekayasa Terpadu untuk Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi lainnya | 74210 | |
| | Jasa Perencanaan Kota | 74210 | |
| | Jasa Arsitektur Pertamanan Komposisi dan Kemurnian | 74210 | |
| | Jasa Pengujian dan Analisa | 74210 | |
| | Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu | 74210 | |
| | Sistem Inspeksi Teknis | 74210 | |
| | Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu lainnya | 74210 | |
| | Jasa Arsitektur Pertamanan | 74210 | |
| 20 | Angkutan Orang a. Dalam Trayek - Angkutan Bis/ Pedesaan | 60211 60212 60213 60214 60215 | Perhubungan |

b. tindak ...

| | | | |
|----|--|----------------|---------------|
| | b. Tidak Dalam Trayek - Angkutan Taksi | 60221 | |
| 21 | Pelayaran Rakyat | 61118 | Perhubungan |
| 22 | Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya dan industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya | 15122 15125 | Perindustrian |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| N0 | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------------------------|---------------|
| 23 | Industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/ celup, ikat, dengan alat yang digerakkan tangan | 17115 | Perindustrian |
| 24 | Industri Batik Tulis | 17124 | Perindustrian |
| 25 | Industri Pengasapan Karet | 25121 | Perindustrian |
| 26 | Industri Perkakas Tangan yang di proses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan | 28932 28933 28939 | Perindustrian |
| 27 | Industri Barang dari Tanah Liat untuk keperluan rumah tangga khusus gerabah. | 26321 | Perindustrian |
| 28 | Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor (agen/distributor) dan Industri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah tangga. | 93050 93062 93061 | Perindustrian |
| 29 | Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khas khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi: Industri Bordir/Sulaman Industri Anyam-anyaman dari rotan dan bambu Industri Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu | 17293 20291 20292 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|----------------|---------------|
| | | | Industri ... |
| | Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari kayu kecuali Mebeller | 20293 | |
| | Industri Alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu | 20294 | |
| | Industri dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain | 20299 | |
| | Industri Alat-alat Musik Tradisional | 36921 | |
| 30 | Industri Perkakas Tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan kecuali cangkul dan sekop. | 28931 | Perindustrian |
| 31 | Gula Merah | 15422 | Perindustrian |
| 32 | Industri Makanan Olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra. | 15494 15498 | Perindustrian |
| 33 | Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian. | 15317 | Perindustrian |
| 34 | Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau. | 16001 | Perindustrian |
| 35 | Budidaya Padi (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha) | 01111 | Pertanian |
| 37 | Budidaya Jagung (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha) | 01112 | Pertanian |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| N0 | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|-----------|
| 38 | Budidaya Tanaman Pangan lainnya selain ubi kayu dan jagung dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha | 01112 | Pertanian |
| 39 | Pembibitan dan Budidaya Babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor | 01221 | Pertanian |
| 40 | Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras serta persilangannya | 01223 | Pertanian |
| 41 | Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25Ha: | | Pertanian |

| Perkebunan ... | | |
|---|-------|--|
| Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya | 01113 | |
| Perkebunan Tembakau | 01114 | |
| Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya | 01115 | |
| Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil | 01116 | |
| Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi | 01117 | |
| Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri | 01118 | |
| Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain | 01119 | |
| Perkebunan Kelapa | 01133 | |
| Perkebunan Kepala Sawit | 01134 | |
| Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman | 01135 | |
| Perkebunan Jambu Mete | 01136 | |
| Perkebunan Lada | 01137 | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|--|-----------|
| | Perkebunan Cengkeh Perkebunan Tanaman Rempah lainnya | 01138 01139 | |
| 42 | Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26/2007 dan/atau perubahannya: Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit Industri Minyak Atsiri Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao | 15141 15143 15144 24294 15313 15314 | Pertanian |

Industri ...

| | | | |
|----|--|----------------|-----------|
| | Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao Industri Kopra | 15315 15318 | |
| 43 | Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha: Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya Perkebunan Tembakau | 01113 01114 | Pertanian |
| | Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya | 01115 | Pertanian |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|--------|
| | Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil | 01116 | |
| | Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi | 01117 | |
| | Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri | 01118 | |
| | Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain | 01119 | |
| | Perkebunan Kelapa | 01133 | |
| | Perkebunan Kelapa Sawit | 01134 | |
| | Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman | 01135 | |
| | Perkebunan Jambu Mete | 01136 | |
| | Perkebunan Lada | 01137 | |
| | Perkebunan Cengkeh | 01138 | |
| | Perkebunan Tanaman Rempah lainnya | 01139 | |

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

b. Kemitraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

b. Kemitraan

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|------------------------|
| 1 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera (Persuteraan Alam) | 02034 | Kehutanan |
| 2 | Pengusahaan Perlebahan | 02039 | Kehutanan |
| 3 | Pengusahaan Rotan | 02031 | Kehutanan |
| 4 | Pengusahaan Bambu | 02039 | Kehutanan |
| 5 | Pengusahaan Gaharu | 02039 | Kehutanan |
| 6 | Pengusahaan Seedlak | 02039 | Kehutanan |
| 7 | Pengusahaan Tanaman Pangan Alternatif (Sagu) | 02039 | Kehutanan |
| 8 | Pengusahaan Getah Pinus | 02032 | Kehutanan |
| 9 | Pengusahaan Damar | 02035 | Kehutanan |
| 10 | Pengusahaan Getah-getahan | 02039 | Kehutanan |
| 11 | Pengusahaan Minyak Atsiri | 02039 | Kehutanan |
| 12 | Pembesaran Ikan Laut | 05021 | Kelautan dan Perikanan |
| 13 | Pembenihan Ikan Laut | 05022 | Kelautan dan Perikanan |
| 14 | Pembesaran Ikan Air Tawar | 05041 | Kelautan dan Perikanan |
| 15 | Pembesaran Ikan Air Payau | 05042 | Kelautan dan Perikanan |
| 16 | Pembenihan Ikan Air Payau | 05044 | Kelautan dan Perikanan |
| 17 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 05043 | Kelautan dan Perikanan |
| 18 | Usaha pengolahan hasil perikanan (UPI) | | Kelautan dan Perikanan |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|------------------------|
| | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya | 15122 | |
| | Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan lainnya | 15125 | |
| 19 | Usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan | | Kelautan dan Perikanan |

| | | | Perdagangan ... |
|----|--|-------|----------------------------|
| | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 51213 | |
| | Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan | 53213 | |
| 20 | Penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon: Pusat layanan informasi (call centre) | 64319 | Komunikasi dan Informatika |
| | Layanan content (ring tone, sms premium, dsb) | 64311 | |
| | Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya | 64319 | |
| 21 | Penyelenggaraan Jasa Multimedia: Akses internet (ISP) | 64314 | Komunikasi dan Informatika |
| 22 | Industri Rokok: Industri Rokok Kretek | 16002 | Perindustrian |
| | Industri Rokok Putih | 16003 | |
| | Industri Rokok lainnya | 16004 | |
| 23 | Industri pemanisan-pengasinan buah-buahan dan sayur-sayuran | 15132 | Perindustrian |
| 24 | Industri Makanan Olahan dari Biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra: Industri Kopra | 15318 | Perindustrian |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 16 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|---------------|
| | Industri Kecap | 15493 | |
| | Industri Makanan dari kedele dan kacang-kacangan selain kecap, tempe dan tahu | 15495 | |
| | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya | 15496 | |
| 25 | Industri Batik Cap | 17124 | Perindustrian |
| 26 | Industri Pengolahan Rotan | 20104 | Perindustrian |
| | Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya | 20103 | |
| 27 | Industri Barang Jadi Kayu Bakau: | | Perindustrian |
| | Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan | 20220 | |

Industri ...

| | | | |
|----|---|-------|---------------|
| | Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Mebeller | 20293 | |
| | Industri Alat-alat Dapur | 20294 | |
| 28 | Industri Minyak Atsiri | 24294 | Perindustrian |
| 29 | Industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang-barang dari semen: | | Perindustrian |
| | Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik | 26322 | |
| | Industri Barang lainnya dari Tanah Liat/Keramik | 26329 | |
| | Industri Kapur | 26412 | |
| | Industri Barang-barang dari Semen | 26421 | |
| | Industri Barang-barang dari Kapur | 26422 | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 17 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|----------------|---------------|
| | Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya | 26429 | |
| 30 | Industri Perhiasan dari Perak: Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia Industri Barang Perhiasan Berharga bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia | 36912 36913 | Perindustrian |
| 31 | Industri kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan termasuk peralatan dan perlengkapannya | 35111 35112 | Perindustrian |
| 32 | Industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya seperti perontok padi, pemipil jagung dan traktor tangan | 29211 | Perindustrian |
| 33 | Industri Kerajinan lainnya: Industri Barang Perhiasan bukan untuk Keperluan Pribadi dari bukan Logam Mulia Industri Permata | 36915 36911 | Perindustrian |

Industri ...

| | | | |
|--|--|----------------|---------------|
| | Industri Kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain | 36993 | |
| | Industri Pengolahan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Daur Ulang Barang-barang bukan Logam | 36999 37200 | Perindustrian |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|---|-------------------------------|
| 34 | Industri paku mur dan baut, industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula, industri pompa dan kompresor, industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, industri perlengkapan sepeda dan becak. | 28993 29113 29120 35912 35922 | Perindustrian |
| 35 | Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis | 15201 | Perindustrian |
| 36 | Kegiatan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan di kawasan transmigrasi | 013 014 050 | Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

c. Kepemilikan ...

c. Kepemilikan Modal

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|--|--------------------------------|
| 1 | Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur | 11200 | Maksimal 95% | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Darat | 11200 | Maksimal 95% | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 3 | Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Migas (operating dan maintenance service) | 11200 | Maksimal 95% | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 4 | Jasa Engineering Procurement Construction (EPC) | 74140 | Maksimal 95% | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 5 | Pembangkit Tenaga Listrik | 40101 | Maksimal 95% | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 6 | Transmisi Tenaga Listrik | 40102 | Maksimal 95% | Energi dan Sumber Daya |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Mineral |
| 7 | Konsultasi Ketenagalistrikan | 4010 | Maksimal 95% | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 8 | Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan | 45312 | Maksimal 95% | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 9 | Pemeliharaan dan Operasi Peralatan Ketenagalistrikan | 4010 | Maksimal 95% | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 10 | Pengembangan Teknologi Peralatan Penyediaan Tenaga Listrik | 4010 | Maksimal 95% | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 11 | Distribusi Tenaga Listrik | 40103 | Maksimal 95% | Energi dan Sumber Daya Mineral |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-------|--------------|---|
| 12 | Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir | 40101 | Maksimal 95% | 12 Pembangkit ... Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 13 | Galeri Seni | 70101 | Maksimal 50% | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 14 | Gedung Pertunjukan Seni | 70101 | Maksimal 50% | Kebudayaan dan Pariwisata |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 15 | Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan: Wisata Tirta Wisata Petualangan Alam Wisata Gua Wisata Minat Usaha lainnya | 92432 92433 92434 92439 | Maksimal 25% | Kehutanan |
| 16 | Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru | 01501 92439 | Maksimal 49% | Kehutanan |
| 17 | Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar | 02059 01502 | Maksimal 49% | Kehutanan |
| 18 | Penangkaran/Budidaya Koral | 01502 | Maksimal 49% | Kehutanan |
| 19 | Usaha Industri Farmasi: Industri Obat Jadi Industri Bahan Baku Obat | 24232 24231 | Maksimal 75% | Kesehatan |
| 20 | Clinic Specialised Medical Services (Klinik Kedokteran Spesialis) | 85122 | Maksimal 65% | Kesehatan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--------------|------|--|--------|
|----|--------------|------|--|--------|

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|--|----------------------------|
| 21 | Clinic Specialised Dental Services (Klinik Kedokteran Gigi Spesialis) | 85123 | Maksimal 65% | 21 Clinic ... Kesehatan |
| 22 | Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Laboratorium Klinik) | 85193 | Maksimal 65% | Kesehatan |
| 23 | Jasa Rumah Sakit lainnya (Klinik Rehabilitasi Mental) | 85119 | Maksimal 65% | Kesehatan |
| 24 | Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Klinik Medical Check- up) | 85193 | Maksimal 65% | Kesehatan |
| 25 | Jasa pengetesan pengujian kalibrasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan kesehatan | 74220 | Maksimal 49% | Kesehatan |
| 26 | Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen (Jasa Manajemen Rumah Sakit) | 74140 | Maksimal 65% | Kesehatan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|---------------------------------|-----------|
| 27 | Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Jasa asistensi dalam evakuasi pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat) | 85193 | Maksimal 65% | Kesehatan |
| 28 | Jasa Pelayanan Akupunktur | 85191 | Maksimal 49% | Kesehatan |
| 29 | Sewa Guna Usaha (Leasing) | 65910 | Maksimal 85% | Keuangan |

30. Pembiayaan ...

| | | | | |
|----|---|----------------------------------|--------------|----------|
| 30 | Pembiayaan Non-Leasing: Pembiayaan Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen Pembiayaan Kartu Kredit Pembiayaan Non Leasing lainnya | 65921 65922 65923 65929 | Maksimal 85% | Keuangan |
| 31 | Modal Ventura | 65930 | Maksimal 85% | Keuangan |
| 32 | Perusahaan Asuransi Kerugian | 66030 | Maksimal 80% | Keuangan |
| 33 | Perusahaan Asuransi Jiwa | 66010 | Maksimal 80% | Keuangan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|-------|--|----------------|
| 34 | Perusahaan Reasuransi | 66030 | Maksimal 80% | Keuangan |
| 35 | Perusahaan Pialang Asuransi | 67204 | Maksimal 80% | Keuangan |
| 36 | Perusahaan Pialang Reasuransi | 66030 | Maksimal 80% | Keuangan |
| 37 | Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi | 67202 | Maksimal 80% | Keuangan |
| 38 | Perusahaan Konsultan Aktuarial | 67203 | Maksimal 80% | Keuangan |
| 39 | Perusahaan Agen Asuransi | 67201 | Maksimal 80% | Keuangan |
| 40 | Bank Devisa | 65121 | Maksimal 99% | Bank Indonesia |
| 41 | Bank Non Devisa | 65122 | Maksimal 99% | Bank Indonesia |
| 42 | Bank Syariah | 65123 | Maksimal 99% | Bank Indonesia |
| 43 | Perusahaan Pialang Pasar Uang | 65999 | Maksimal 99% | Bank Indonesia |

Penyelenggaraan ...

| | | | | |
|----|--|--|--|-------------------------------|
| 44 | Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi: | | | Komunikasi dan Informatika |
|----|--|--|--|-------------------------------|



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------------------------|--|----------------------------|
| | a. Penyelenggaraan Jaringan Tetap: - Lokal berbasis kabel, dengan teknologi circuit switched atau packet switched - Berbasis radio, dengan teknologi circuit switched atau packet switched | 64210 64210 | Maksimal 49% Maksimal 49% | |
| | b. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup | 64210 | Maksimal 65% | |
| | c. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak - Seluler - Satelit | 64222 64223 | Maksimal 65% Maksimal 65% | |
| 45 | Penyelenggaraan Jasa Multimedia: Jasa sistem komunikasi data Jasa interkoneksi internet (NAP) Jasa internet teleponi untuk keperluan publik | 64322 64329 64324 | Maksimal 95% Maksimal 65% Maksimal 49% | Komunikasi dan Informatika |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|-------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| | Jasa multimedia lainnya | 64329 | Maksimal 49% | |

46 Pembentukan ...

| | | | | |
|----|---|--|--------------|----------------------------|
| 46 | Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium) | 00000 | Maksimal 95% | Komunikasi dan Informatika |
| 47 | Jasa Konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) Golongan Non Kecil: Pekerjaan Galian, Pemindahan dan Timbunan Tanah Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk lahan Pertambangan Pekerjaan Perancah dan Bekisting Pekerjaan Pembongkaran untuk bangunan gedung bertingkat lebih dari dua lantai | 45100 45100 45243 45100/ 45211 | Maksimal 55% | Pekerjaan Umum |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|--|--------|
| | Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Gudang atau Industri Pabrik | 45213 | | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Komersial | 45214 | | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan sarana Hiburan Umum | 45208 | | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan sejenisnya | 45217 | | |

| | | | | |
|--|---|-------|--------------|----------------|
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan | 45216 | | Pekerjaan ... |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan | 45215 | Maksimal 55% | Pekerjaan Umum |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan lainnya | 45219 | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|---|--|----------------|
| | Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Kereta Api, dan Landasan Pacu Pesawat Terbang Pekerjaan Konstruksi untuk Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Jalan Bawah Tanah Pekerjaan Konstruksi untuk jalur pipa air transmisi, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel) | 45221/ 45222 45221/ 45222 45328 | | |
| 48 | Jasa Konstruksi (Jasa pelaksana konstruksi) Golongan Non Kecil: Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan Pekerjaan Pembesian Pekerjaan Konstruksi per-pipa-an Gas Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran Pekerjaan Konstruksi Sistem Alarm Pencurian | 00000 45221 45314 45315 45315 | Maksimal 55% | Pekerjaan Umum |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|-------|--|----------------|
| | Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator | 45316 | | Pekerjaan ... |
| | Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran dengan operator | 45500 | | |
| | Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan | 00000 | | |
| | Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan | 00000 | | |
| | Pekerjaan Konstruksi untuk satu atau dua lantai bangunan bertingkat | 45211 | Maksimal 55% | Pekerjaan Umum |
| | Pembuatan Sumur Air | 45242 | | |
| | Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran | 00000 | | |
| | Pekerjaan Beton | 00000 | | |
| | Pekerjaan Pasangan Batu Kali | 00000 | | |
| | Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya: | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 30 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|--|--------|
| | Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, Ventilasi, dan Pengatur Suhu Udara | 45317 | | |
| | Pekerjaan Plumbing (Pekerjaan Drain, termasuk menyiapkan pembuangan air kotor) | 45311 | | |
| | Pekerjaan Pemasangan Kabel dan Fitting listrik | 45312 | | |

Pekerjaan ...

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | Pekerjaan Konstruksi Antena Perumahan | 45313 | | |
| | Pekerjaan Konstruksi listrik lainnya | 45311 | | |
| | Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara) | 45315 | | |
| | Pekerjaan Konstruksi Pagar | 45316 | | |
| | Pekerjaan Instalasi lainnya | 45319 | | |
| | Pekerjaan Instalasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain | 45319 | | |
| | Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela | 45401 | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 31 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|---|--|----------------|
| | Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Pengecatan Pekerjaan Pemasangan Keramik/ Marmer Dinding dan Lantai | 00000 45403 45402 | | |
| | Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai lainnya Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam Pekerjaan Dekorasi Interior Pekerjaan Ornamen Pekerjaan Akhir dan Perapihan lainnya | 45402 00000 45404 00000 45409 | Maksimal 55% | Pekerjaan Umum |

| 49 Jasa ... | | | | |
|-------------|---|---------------------------------|--------------|----------------|
| 49 | Jasa Bisnis /Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Non Kecil: Jasa Pra Desain dan Konsultasi Arsitektur Jasa Desain Arsitektur Jasa Administrasi Kontrak | 74210 74210 74210 | Maksimal 55% | Pekerjaan Umum |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|-------|--|--------|
| | Jasa Desain Arsitektur dan Administrasi Kontrak | 74210 | | |
| | Jasa Arsitektur lainnya | 74210 | | |
| | Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur Bangunan | 74210 | | |
| | Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil | 74210 | | |
| | Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Instalasi lainnya | 74210 | | |
| | Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan lainnya | 74210 | | |
| | Jasa Rekayasa Terpadu untuk Prasarana Transportasi | 74210 | | |
| | Jasa Rekayasa Terpadu dan dan Manajemen Proyek Pekerjaan Air dan Sanitasi dengan Sistem Terima Jadi | 74210 | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--------------|------|--|--------|
|----|--------------|------|--|--------|

Jasa ...

| | | | | |
|----|---|-------|--------------|----------------|
| | Jasa Rekayasa Terpadu untuk Konstruksi Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi | 74210 | Maksimal 55% | Pekerjaan Umum |
| | Jasa Rekayasa Terpadu untuk Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi lainnya | 74210 | | |
| | Jasa Perencanaan Kota | 74210 | | |
| | Jasa Arsitektur | 74210 | | |
| | Pertamanan | | | |
| | Jasa Pengujian dan Analisa komposisi dan kemurnian barang-barang fisik | 74210 | | |
| | Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu | 74210 | | |
| | Sistem Inspeksi Teknis | 74210 | | |
| | Jasa Pengujian dan Analisa lainnya | 74210 | | |
| 50 | Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Non Kecil: Jasa Arsitektur Pertamanan | 74210 | Maksimal 55% | Pekerjaan Umum |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--------------------------------------|-------|--|---------------------|
| 51 | Pengusahaan Jalan Tol | 45221 | Maksimal 95% | Pekerjaan Umum |
| 52 | Pengusahaan Air Minum | 41001 | Maksimal 95% | Pekerjaan Umum |
| 53 | Pendidikan Dasar dan Menengah: | | Maksimal 49% | Pendidikan Nasional |
| | Jasa Pendidikan Pra Sekolah Swasta | 80121 | | |
| | Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta | 80122 | | |

| | | | | |
|----|--|-------|--------------|---------------------|
| | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta | 80123 | | Sekolah ... |
| | Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta | 80221 | | |
| | Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta | 80222 | | |
| 54 | Pendidikan Tinggi: | | Maksimal 49% | Pendidikan Nasional |
| | Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta | 80321 | | Pendidikan Nasional |
| | Jasa Pendidikan Tinggi Non Gelar Swasta | 80322 | Maksimal 49% | Pendidikan Nasional |
| 55 | Pendidikan Non - Formal: | | Maksimal 49% | Pendidikan Nasional |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 35 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|-------|--|---------------------|
| | Jasa Pendidikan Komputer Swasta | 80921 | Maksimal 49% | Pendidikan Nasional |
| | Jasa Pendidikan Bahasa Swasta | 80922 | | |
| | Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta | 80923 | | |
| | Jasa Pendidikan Ketrampilan Swasta lainnya | 80929 | | |
| 56 | Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha(Direct Selling) | 00000 | Maksimal 60% | Perdagangan |
| 57 | Angkutan Penyeberangan: Angkutan Penyeberangan Antar Negara | 61221 | Maksimal 49% | Perhubungan |

| | | | | |
|--|--|-------|--|--------------|
| | Angkutan Penyeberangan Umum Antar Propinsi | 61222 | | Angkutan ... |
| | Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Propinsi | 61223 | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|-------|--|-------------|
| | Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota | 61224 | | |
| | Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota | 61225 | | |
| | Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota | 61226 | | |
| 58 | Angkutan Sungai dan danau Kapal < 30 GT: Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur | 61211 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| | Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur | 61212 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| | Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk wisata | 61213 | | |
| | Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan atau hewan | 61214 | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|-------|--|--------------|
| | Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus | 61215 | | Angkutan ... |
| | Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya | 61216 | | |
| 59 | Sarana ASDP: Jasa Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan danau | 63322 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| | Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan | 63323 | | |
| 60 | Angkutan Barang Umum | 60231 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 61 | Angkutan Barang Berbahaya | 60232 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 62 | Angkutan Barang Khusus | 60232 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 63 | Angkutan Barang Peti Kemas | 60231 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 64 | Angkutan Barang Alat Berat | 60232 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 65 | Usaha penunjang pada terminal | 63310 | Maksimal 49% | Perhubungan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|---------------------------------|-------------|
| 66 | Angkutan Berjadwal Domestik Umum | 62111 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 67 | Angkutan Udara Berjadwal Domestik Perintis | 62112 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 68 | Angkutan Berjadwal Internasional | 62120 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 69 | Angkutan Udara tidak Berjadwal Domestik Umum | 62201 | Maksimal 49% | Perhubungan |

| | | | | |
|----|---|-------|--------------|--------------------------------|
| 70 | Angkutan Udara tidak Berjadwal Domestik Perintis | 62202 | Maksimal 49% | 70 Angkutan ... Perhubungan |
| 71 | Angkutan Udara Khusus Kegiatan Keudaraan Penyemprotan dan Penyerbukan | 62311 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 72 | Angkutan Udara Khusus Kegiatan Keudaraan, Pemotretan, Survei dan Pemetaan | 62312 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 73 | Angkutan Udara Khusus Olahraga | 62313 | Maksimal 49% | Perhubungan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|--|-------------|
| 74 | Angkutan Udara Khusus Orang Sakit (Medical Evacuation) | 62314 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 75 | Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat | 62320 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 76 | Jasa Kebandar-udaraan | 63330 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 77 | Jasa Pengurusan Transportasi | 63540 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 78 | Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara | 63540 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 79 | Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing | 63420 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 80 | Jasa Penunjang Langsung Kegiatan Penerbangan | 63330 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 81 | Angkutan Laut: Domestik: Angkutan laut domestik umum liner untuk penumpang | 61111 | Maksimal 49% | Perhubungan |

| | | | | |
|--|---|-------|--|--------------|
| | Angkutan laut domestik umum tramper untuk penumpang | 61112 | | Angkutan ... |
|--|---|-------|--|--------------|



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|--|-------------|
| | Angkutan laut domestik umum liner untuk barang | 61113 | | |
| | Angkutan laut domestik umum tramper untuk barang | 61114 | | |
| | Angkutan laut domestik khusus untuk wisata | 61115 | | |
| | Angkutan laut domestik khusus untuk barang | 61116 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| | Angkutan laut domestik perintis | 61117 | | |
| | Angkutan laut domestik pelayaran rakyat | 61118 | | |
| | Internasional: Angkutan laut internasional umum liner untuk penumpang | 61121 | | |
| | Angkutan laut internasional umum tramper untuk penumpang | 61122 | | |
| | Angkutan laut internasional umum liner untuk barang | 61123 | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 41 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|--|--------|
| | Angkutan laut internasional umum tramper untuk barang | 61124 | | |
| | Angkutan laut internasional khusus untuk wisata | 61125 | | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | Angkutan laut internasional khusus untuk barang | 61126 | | Angkutan ... |
| | Angkutan laut internasional pelayaran rakyat | 61127 | | |
| 82 | Bongkar Muat/BM | 63100 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 83 | Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal RO-RO) | 63210 63220 63290 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 84 | Penyediaan fasilitas pelabuhan berupa penampungan limbah (reception facilities). | 63290 | Maksimal 49% | Perhubungan |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|-------|---------------------------------|---------------|
| 85 | Jasa salvage dan/atau pekerjaan bawah Air (PBA) | 00000 | Maksimal 49% | Perhubungan |
| 86 | Pemeliharaan dan reparasi mobil | 93040 | Maksimal 49% | Perindustrian |
| 87 | Budidaya padi (dengan luas lebih dari 25 Ha) | 01111 | Maksimal 95% | Pertanian |
| 88 | Budidaya jagung (dengan luas lebih dari 25 Ha) | 01112 | Maksimal 95% | Pertanian |
| 89 | Budidaya ubi kayu (dengan luas lebih dari 25Ha) | 01112 | Maksimal 95% | Pertanian |

| | | | | |
|----|--|----------------|--------------|------------------------------|
| 90 | Budidaya tanaman pangan lainnya selain ubi kayu dan jagung (dengan luas lebih dari 25Ha) | 01112 | Maksimal 95% | 90 Budidaya ... Pertanian |
| 91 | Usaha perbenihan/pembibitan padi dan palawija | 01111 01112 | Maksimal 95% | Pertanian |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|---|--|-----------|
| 92 | Usaha perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih, sampai luasan tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007 dan/ atau perubahannya, tanpa unit pengolahan: Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya Perkebunan Tembakau Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Perkebunan Kelapa Perkebunan Kelapa Sawit | 01113 01114 01115 01116 01117 01118 01119 01133 01134 | Maksimal 95% | Pertanian |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 44 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|--|----------------|
| | Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman | 01135 | | Perkebunan ... |
| | Perkebunan Jambu Mete | 01136 | Maksimal 95% | Pertanian |
| | Perkebunan Lada | 01137 | | |
| | Perkebunan Cengkeh | 01138 | | |
| | Perkebunan Tanaman Rempah lainnya | 01139 | | |
| 93 | Usaha industri pengolahan hasil perkebunan (dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, sesuai Permentan No. 26 Th 2007 dan/ atau perubahannya): | | Maksimal 95% | Pertanian |
| | Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani | 15141 | | |
| | Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa | 15143 | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|-------|--|--------|
| | Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit | 15144 | | |
| | Industri Minyak Atsiri | 24294 | | |
| | Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi | 15313 | | |
| | Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao | 15314 | | |
| | Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji- bijian selain Kopi dan Kakao | 15315 | | |
| | Industri Kopra | 15318 | | |

94 Usaha ...

| | | | | |
|----|--|--|--------------|-----------|
| 94 | Usaha perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007 dan/ atau perubahannya: | | Maksimal 95% | Pertanian |
|----|--|--|--------------|-----------|



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|-------|--|-----------|
| | Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani | 15141 | Maksimal 95% | Pertanian |
| | Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa | 15143 | | |
| | Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit | 15144 | | |
| | Industri Minyak Atsiri | 24294 | | |
| | Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi | 15313 | | |
| | Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao | 15314 | | |
| | Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji- bijian selain Kopi dan Kakao | 15315 | | |
| | Industri Kopra | 15318 | | |
| 95 | Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih: | | Maksimal 95% | Pertanian |

Perkebunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|--|--------|
| | Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya | 01113 | | |
| | Perkebunan Tembakau | 01114 | | |
| | Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya | 01115 | | |
| | Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil | 01116 | | |
| | Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi | 01117 | | |
| | Perkebunan Tanaman Minyak Asiri | 01118 | | |
| | Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain | 01119 | | |
| | Perkebunan Kelapa | 01133 | | |
| | Perkebunan Kepala Sawit | 01134 | | |
| | Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman | 01135 | | |
| | Perkebunan Jambu Mete | 01136 | | |
| | Perkebunan Lada | 01137 | | |
| | Perkebunan Cengkeh | 01138 | | |
| | Perkebunan Tanaman Rempah lainnya | 01139 | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|-------|--|-------------------------------|
| 96 | Jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja). | 74910 | Maksimal 49% | Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

97 Pelatihan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|--|-------|--|-------------------------------|
| 97 | Pelatihan Kerja (untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja yang antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan engineering, tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja). | 80929 | Maksimal 49% | Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

d. Lokasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

d. Lokasi Tertentu

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | LOKASI | SEKTOR |
|----|---|-------|--|-----------|
| 1 | Pembibitan dan Budidaya Babi (jumlah lebih dari 125 ekor) | 01221 | tidak bertentangan dengan dengan PERDA | Pertanian |

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

e. Perizinan Khusus

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR | KETERANGAN |
|----|--|-------|-----------|---|
| 1 | Pertambangan Mineral Radio Aktif | 12000 | BATAN | Mendapat rekomendasi dari BATAN dan bekerjasama dengan BATAN |
| 2 | Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000M ³ /Th | 20101 | Kehutanan | Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR | KETERANGAN |
|----|-----------------|-------|-----------|---|
| | | | | dan/atau perubahannya |
| 3 | Industri Veneer | 20214 | Kehutanan | Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya |

4 Industri ...

| | | | | |
|---|--|-------|-----------|---|
| 4 | Industri Kayu Lapis | 20211 | Kehutanan | Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya |
| 5 | Industri Laminated Veneer Lumber (LVL) | 00000 | Kehutanan | Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya |
| 6 | Industri Serpih Kayu (wood chip) | 20299 | Kehutanan | Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 53 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR | KETERANGAN |
|----|--|-------|----------------------------|---|
| | | | | PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya |
| 7 | Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar | 02049 | Kehutanan | Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan |
| 8 | Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEI. | 05011 | Kelautan dan Perikanan | Persyaratan dan ketentuan telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.17/MEN/2006 dan/atau perubahannya |
| 9 | Unit Pelayanan Pos: - Surat - Warkat Pos - Kartu Pos | 64120 | Komunikasi dan Informatika | Hanya monopoli untuk BUMN yang lingkup usahanya di bidang pos yaitu PT. POS Indonesia |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|-------|-----------|---|
| 10 | Produsen Narkotika (Industri farmasi) | 24231 | Kesehatan | 10 Produsen ... Izin Khusus dari Menteri Kesehatan |
|----|---------------------------------------|-------|-----------|---|



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR | KETERANGAN |
|----|---|-------|---|--|
| 11 | Pedagang Besar farmasi Narkotika | 51900 | Kesehatan | Izin Khusus dari Menteri Kesehatan |
| 12 | Penyediaan dan perusahaan pelabuhan penyeberangan | 63323 | Perhubungan | Harus bekerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah |
| 13 | Penyediaan dan perusahaan pelabuhan penyeberangan | 63322 | Perhubungan | Harus bekerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah |
| 14 | Industri Percetakan Khusus/Dokumen Sekuriti seperti, perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram | 22140 | Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL)/ Badan Intelejen Negara (BIN) | 1) Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN 2) Wajib mendapat rekomendasi dari Departemen Perindustrian |
| 15 | Industri Percetakan Uang | 22140 | BOTASUPAL/BIN | 1) Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN (Percetakan uang RI (rupiah) hanya oleh Perum Peruri) 2) Wajib mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia |
| 16 | Industri Kertas Berharga | 21013 | BOTASUPAL/BIN | 1)Wajib mendapat izin operasional dari |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 55 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR | KETERANGAN |
|----|-----------------------|-------|---------------|---|
| | | | | BOTASUPAL/BIN 2)Wajib mendapat rekomendasi dari Departemen Perindustrian |
| 17 | Industri Tinta Khusus | 24293 | BOTASUPAL/BIN | 1)Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN |

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---|
| | | | | 2) Wajib ... 2)Wajib mendapat rekomendasi dari Departemen Perindustrian |
| 18 | Industri Bubur Kertas Pulp) dari kayu) | 21011 | Perindustrian | Bahan baku berasal dari chip impor atau jaminan bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) |
| 19 | Industri Rokok: Industri Rokok Kretek | 16002 | Perindustrian | 1) Rekomendasi dari Departemen Perindustrian bahwa badan usaha tersebut merupakan pengembangan dari industri yang telah ada, atau merupakan industri rokok skala kecil yang telah dibina, atau 2) Wajib Bermitra dengan industri rokok |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR | KETERANGAN |
|----|--|----------------|------------------------|--|
| | Industri Rokok Putih Industri Rokok lainnya | 16003 16004 | | skala kecil/menengah dan koperasi |
| 20 | Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Pertanian | 01119 | Pertanian | Rekomendasi dari Menteri Pertanian berdasarkan penelitian komisi nasional |
| 21 | Industri Peleburan Timah Hitam | 27201 | Perindustrian | Rekomendasi dari KLH mengenai proses produksi dan pengolahan limbah |
| 22 | Pengangkutan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam | 00000 | Kelautan dan Perikanan | Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkutan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam |

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

f. Modal ...

f. Modal Dalam Negeri 100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|---------------------------|
| 1 | Pembuatan Film | 92112 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | Pembuatan sarana promosi film (iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll) | 74300 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | Jasa Teknik film: - Studio pengambilan gambar - Sarana pembuatan film - Sarana penyuntingan, pengisian suara, pemberian teks, penggandaan film, dsb. | 71290 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 4 | Distribusi Film (ekspor, impor dan pengedaran) | 92112 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 5 | Penayangan: bioskop/gedung teater film | 92120 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 6 | Studio Rekaman (Cassette, VCD, DVD, dll) | 22130 | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 7 | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) | 02020 | Kehutanan |
| 8 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan | 02059 | Kehutanan |
| 9 | Pengadaan dan Peredaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan) | 02039 | Kehutanan |
| 10 | Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan | 05011 | Kelautan dan Perikanan |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 58 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|----------------------------------|------------------------|
| | laut lepas | | |
| 11 | Perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT, di wilayah perairan di atas 12 Mil | 05011 | Kelautan dan Perikanan |
| | | | 12 Penggalian ... |
| 12 | Penggalian Pasir Laut | 14105 | Kelautan dan Perikanan |
| 13 | Perdagangan Besar Farmasi | 51900 | Kesehatan |
| 14 | Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi | 51900 | Kesehatan |
| 15 | Usaha Industri Obat Tradisional | 24234 | Kesehatan |
| 16 | Clinic General Medical Services/Rumah Sakit Umum/Klinik Pengobatan Umum | 85114 | Kesehatan |
| 17 | Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Ambulance Services) | 85193 | Kesehatan |
| 18 | Jasa Rumah Sakit lainnya (Residential Health Services) | 85119 | Kesehatan |
| 19 | Praktek Perorangan Tenaga Kesehatan: Praktek Dokter Umum Praktek Dokter Spesialis Praktek Dokter Gigi Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis | 85121 85122 85123 85191 | Kesehatan |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 59 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|----------------|
| | Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional | 85192 | |
| 20 | Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar | 85119 | Kesehatan |
| 21 | Pusat/Balai Stasiun Penelitian Kesehatan | 73120 | Kesehatan |
| 22 | Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Pelayanan Pest Control/Fumigasi) | 85193 | Kesehatan |
| 23 | Pengolahan Obat Tradisional | 24234 | Kesehatan |
| 24 | Rumah Bersalin Swasta | 85113 | Kesehatan |
| 25 | Apotik (Praktek Profesi Apoteker) | 52312 | Kesehatan |
| 26 | Toko Obat/Apotik Rakyat | 52313 | Kesehatan |
| 27 | Dana Pensiun | 66020 | Keuangan |
| 28 | BPR Konvensional | 65191 | Bank Indonesia |

29 BPR ...

| | | | |
|----|--|-------|----------------------------|
| 29 | BPR Syariah | 65192 | Bank Indonesia |
| 30 | Pedagang Valuta Asing | 67191 | Bank Indonesia |
| 31 | +Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) | 92132 | Komunikasi dan Informatika |
| 32 | +Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) | 92132 | Komunikasi dan Informatika |
| 33 | Perusahaan Pers | 22120 | Komunikasi dan Informatika |
| 34 | Jasa bisnis/jasa konsultasi kontruksi golongan Besar, Menengah, dan Kecil: Jasa Konsultasi Rekayasa | 74210 | Pekerjaan Umum |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 60 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|---|----------------|
| | Jasa Rekayasa Desain untuk Proses Industri dan Produksi | 74210 | Pekerjaan Umum |
| | Jasa Rekayasa Desain lainnya | 74210 | |
| 35 | Perdagangan Eceran: Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m ² Departement Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m ² Minimarket (dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m ²) Community Store Convenience Store | 52111 52191 52111 00000 00000 | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian: | | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Padi dan Palawija | 52511 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Buah-buahan | 52512 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Sayur-sayuran | 52513 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Hasil Peternakan | 52514 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Hasil Perikanan | 52515 | |

| | | | |
|--|--|-------|--------------------------------|
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Sayur-sayuran | 52513 | Perdagangan ... Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Hasil Peternakan | 52514 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Hasil Perikanan | 52515 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|--------|
| | Perdagangan Eceran Eceran Kaki Lima Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian lainnya | 52516 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan, Minuman hasil Industri Pengolahan: | | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Beras | 52521 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Roti, Kue Kering, Kue Basah dan sejenisnya | 52522 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Kopi, Gula Pasir, Gula Merah, dan sejenisnya | 52523 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 52524 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Daging Olahan dan Biota Air Olahan | 52525 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Rokok dan Tembakau | 52527 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan | 52528 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl | 52529 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|-----------------|
| | | | Perdagangan ... |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium : | | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia | 52531 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Farmasi | 52532 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Jamu | 52533 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Kosmetik | 52534 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Pupuk dan Pemberantas Hama | 52535 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Minyak Atsiri | 52536 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium Ytdl | 52539 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang keperluan pribadi: | | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil | 52541 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakaian Jadi | 52542 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|--------|
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki lainnya | 52543 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Pelengkap Pakaian dan Benang | 52544 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Kacamata | 52545 | |

Perdagangan ...

| | | | |
|--|---|-------|-------------|
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Perhiasan | 52546 | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Jam | 52547 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan sejenisnya | 52548 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Keperluan Pribadi lainnya | 52549 | |
| | Perdagangan Eceran kaki lima perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur: | | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Elektronik | 52551 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat dan Perlengkapan Listrik | 52552 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin | 52553 | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 64 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|--------|
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat | 52554 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu, atau Rotan | 52555 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu atau Tanah Liat, Kayu, Bambu, atau Rotan | 52556 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat-Alat Kebersihan | 52557 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Perlengkapan Rumah Tangga lainnya | 52559 | |

| | | | |
|--|---|-------|-----------------|
| | Perdagangan Eceran kaki lima bahan bakar dan pelumas : | | Perdagangan ... |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar Minyak, Gas dan Minyak Pelumas | 52561 | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar lainnya | 52569 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|--------|
| | Perdagangan Eceran kaki lima kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi, dan komputer: | | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Kertas, Karton, dan Barang dari Kertas | 52571 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat Tulis Menulis dan Gambar | 52572 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Percetakan, Penerbitan dan Perangkat Lunak (Software) | 52573 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat-alat Olahraga dan Alat Musik | 52574 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya | 52575 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Mesin Kantor | 52576 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Campuran Kertas, Karton, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan lainnya | 52577 | |

Perdagangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|-------------|
| | Perdagangan Eceran kaki lima barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan: | | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Kerajinan | 52581 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Mainan Anak-anak | 52582 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Lukisan | 52583 | |
| | Perdagangan eceran kaki lima barang-barang bekas: | | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 52591 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakaian Jadi, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian, dan Barang-Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 52592 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Listrik dan Elektronik Bekas | 52593 | |
| | Pedagangan Eceran Kaki Lima Barang Antik | 52594 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Bekas Campuran | 52595 | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima lainnya: | | |
| | Perdagangan Eceran Kaki Lima lainnya | 52600 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|--------|
| | Perdagangan Eceran Keliling: Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian | 52721 | |

| | | | Perdagangan ... |
|--|---|-------|-----------------|
| | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | 52722 | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Keliling Bahan- Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium | 52723 | |
| | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang-Barang Keperluan Pribadi | 52724 | |
| | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur | 52725 | |
| | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas | 52726 | |
| | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang-Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer | 52727 | |
| | Perdagangan Eceran Keliling Barang-Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan | 52728 | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 68 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|--------|
| | Perdagangan Eceran Keliling Barang-barang lainnya | 52729 | |
| | Penjual Makanan dan Minuman Keliling/ tempat tidak Tetap: Penjual Makanan dan Minuman Keliling/ tempat tidak Tetap | 55250 | |
| | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman atau Tembakau: | | |

| | | | |
|--|--|-------|-----------------|
| | Perdagangan Eceran Barang-barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau selain Di Supermarket / minimarket | 52112 | Perdagangan ... |
| | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya bukan Bahan Makanan, Minuman, atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) selain di Toserba (Departement Store). | 52192 | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian: Perdagangan Eceran Padi dan Palawija. | 52211 | |
| | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 52212 | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 69 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|--------------------------------|
| | Perdagangan Eceran Sayuran | 52213 | Perdagangan ... Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 52214 | |
| | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 52215 | |
| | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian lainnya | 52219 | |
| | Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan: | | |
| | Perdagangan Eceran Beras | 52221 | |
| | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan sejenisnya | 52222 | |
| | Perdagangan Eceran Kopi, Gula pasir, atau Gula merah | 52223 | |
| | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom | 52224 | |
| | Perdagangan Eceran Daging dan biota air olahan | 52225 | |
| | Perdagangan Eceran Rokok dan Tembakau | 52227 | |
| | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan | 52228 | |
| | Perdagangan Eceran Makanan lainnya | 52229 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|--------|
| | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan alat Laboratorium : | | |
| | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 52311 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik | 52312 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Farmasi selain di Apotik | 52313 | |
| | Perdagangan Eceran Jamu | 52314 | |
| | Perdagangan Eceran Kosmetik | 52315 | |
| | Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantasan Hama | 52316 | |
| | Perdagangan Eceran Alat-alat Laboratorium, Farmasi, dan Kesehatan | 52317 | |
| | Perdagangan Eceran Minyak Atsiri | 52318 | |
| | Perdagangan Eceran lainnya selain yang telah tercakup pada kelompok 52311 s.d 52318 | 52319 | |
| | Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi : | | |
| | Perdagangan Eceran Tekstil | 52321 | |
| | Perdagangan Eceran Pakaian Jadi | 52322 | |
| | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki lainnya | 52323 | |

Perdagangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|-------------|
| | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pakaian dan Benang | 52324 | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Kaca Mata | 52325 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 52326 | |
| | Perdagangan Eceran Jam | 52327 | |
| | Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan sejenisnya | 52328 | |
| | Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi lainnya | 52329 | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur: | | |
| | Perdagangan Eceran Furnitur | 52331 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Elektronik | 52332 | |
| | Pedagang Eceran Alat dan Perlengkapan Listrik | 52333 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik | 52334 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat | 52335 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan | 52336 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|--------|
| | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik , Batu , Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan | 52337 | |
| | Perdagangan Eceran Alat-alat Telekomunikasi | 52338 | |

| | | | Perdagangan ... Perdagangan |
|--|---|-------|--------------------------------|
| | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur lainnya | 52339 | |
| | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi: | | |
| | Perdagangan Eceran Barang-barang Logam untuk Bahan Konstruksi | 52341 | |
| | Perdagangan Eceran Kaca untuk Bahan Konstruksi | 52342 | |
| | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Gelas | 52343 | |
| | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu | 52344 | |
| | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen | 52345 | |
| | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu | 52346 | |
| | Perdagangan Eceran Cat | 52347 | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 73 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|--------|
| | Perdagangan Eceran Macam-macam Material Bangunan | 52348 | |
| | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi lainnya | 52349 | |
| | Perdagangan Eceran bahan Bakar dan Minyak Pelumas: | | |
| | Perdagangan Eceran Premium, Premix, dan Solar Di Kios/Toko | 52351 | |
| | Perdagangan Eceran Minyak tanah | 52352 | |
| | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 52353 | |
| | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas | 52354 | |

| | | | |
|--|---|-------|-----------------|
| | Perdagangan Eceran Bahan Bakar lainnya | 52359 | Perdagangan ... |
| | Perdagangan Eceran Kertas, barang-barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, Komputer: | | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Kertas Karton | 52361 | |
| | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar | 52362 | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 74 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|-----------------|
| | Perdagangan Eceran Hasil Percetakan, Penerbitan dan Perangkat Lunak (software) | 52363 | |
| | Perdagangan Eceran Alat-alat Olahraga | 52364 | |
| | Perdagangan Eceran Alat-alat Musik | 52365 | |
| | Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya | 52366 | |
| | Perdagangan Eceran Alat-alat Optik dan Perlengkapannya | 52367 | |
| | Perdagangan Eceran Komputer dan Mesin Kantor | 52368 | |
| | Perdagangan Eceran Mesin-Mesin (Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) dan Suku Cadang (Onderdil), termasuk Alat-alat Transportasi: | | |
| | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya | 52371 | |
| | Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya | 52372 | |
| | Perdagangan Eceran Mesin lainnya dan Perlengkapannya | 52373 | |
| | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat tidak Bermotor dan Perlengkapannya | 52374 | Perdagangan ... |
| | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya | 52375 | Perdagangan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|--------|
| | Perdagangan Eceran Barang-Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak, dan Lukisan: | | |
| | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan sejenisnya | 52381 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang diawetkan | 52382 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam | 52383 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik | 52384 | |
| | Perdagangan Eceran Mainan Anak-anak | 52385 | |
| | Perdagangan Eceran Lukisan | 52386 | |
| | Perdagangan Eceran Barang-Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak dan Lukisan lainnya | 52389 | |
| | Perdagangan Eceran Komoditi lainnya (bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau): | | |
| | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 52391 | |
| | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 52392 | |

Perdagangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|-------------|
| | Perdagangan Eceran Binatang Peliharaan (Pet Shop) | 52393 | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran Bunga Potong / Florist | 52394 | |
| | Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-buahan dan Tanaman Obat-obatan | 52395 | |
| | Perdagangan Eceran Komoditi lainnya (bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau) | 52399 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Bekas: | | |
| | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 52401 | |
| | Perdagangan Eceran Pakaian Jadi, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas | 52402 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 52403 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas | 52404 | |
| | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas | 52405 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Antik | 52406 | |
| | Perdagangan Eceran Barang Bekas lainnya | 52409 | |
| | Kedai Makanan dan Minuman: Kedai Makanan dan Minuman | 55240 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|--------|
| | Penjualan Mobil: Penjualan Eceran Mobil | 50102 | |

| | | | |
|--|--|-------|-----------------------------|
| | Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil: Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil | 50202 | Penjualan... Perdagangan |
| | Penjualan, Pemeliharaan, dan Reparasi Sepeda Motor serta Suku Cadang dan Aksesorisnya Penjualan Eceran Sepeda Motor serta Suku Cadang dan Aksesorisnya | 50302 | |
| | Perdagangan Eceran Melalui Media: Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi Kosmetik, dan Alat Laboratorium. | 52711 | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 78 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|--------|
| | Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang-Barang Keperluan Pribadi. | 52712 | |
| | Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang-Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur | 52713 | |
| | Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang-Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam 52711 S.d 52713 | 52714 | |
| | Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang lainnya | 52719 | |

| | | | |
|----|--|-------|--------------------------------|
| 36 | Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak (jasa keagenan/ <i>Commision Agent</i>) | 51100 | Perdagangan ... Perdagangan |
| | Perdagangan impor berdasarkan balas jasa(fee) atau kontrak (jasa keagenan/ <i>Commision Agent</i>) | 54100 | |
| 37 | Perdagangan besar minuman keras/ beralkohol (importir, distributor, dan sub distributor) | 51220 | Perdagangan |
| | Perdagangan Eceran minuman keras/ beralkohol | 52226 | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 79 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|-------------|
| | Perdagangan Eceran kaki lima minuman keras/beralkohol | 52526 | |
| 38 | Jasa Survei Perdagangan | 00000 | Perdagangan |
| 39 | Broker properti/real estate atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak | 70200 | Perdagangan |
| 40 | Jasa Persewaan Alat Transportasi Darat (<i>Rental Without Operator</i>) | 71110 | Perdagangan |
| 41 | Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya | 71210 | Perdagangan |
| | Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya | 71220 | |
| | Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk komputer) | 71230 | |
| | Persewaan Mesin lainnya dan Peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain | 71290 | |
| 42 | Jasa Kebersihan Gedung | 74930 | Perdagangan |
| 43 | Jasa Kebersihan Swasta | 90002 | Perdagangan |
| 44 | Jasa perusahaan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain | 74990 | Perdagangan |
| 45 | Jasa Kegiatan lainnya: | | Perdagangan |
| | Jasa Binatu | 93010 | |
| | Pangkas Rambut | 93021 | |
| | Salon Kecantikan | 93022 | |

| | | | |
|--|---|-------|----------------|
| | Penjahitan | 93091 | Penjahitan ... |
| | Perorangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain | 93094 | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|---|-------|-------------------------------|
| 46 | Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia/CTKI) | 74910 | Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 47 | Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh [Proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perjanjian kerja), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, memperkerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa cleaning service, satpam, jasa boga dan jasa penunjang lainnya] | 74910 | Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

Catatan:

- +) Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
- Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

g. Kepemilikan ...

g. Kepemilikan Modal serta Lokasi

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | LOKASI | SEKTOR |
|----|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | Hotel (Bintang 1-2): Hotel Bintang Satu Hotel Bintang Dua | 55115 55114 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | Hotel Melati | 55120 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | Jasa Akomodasi lainnya (Motel dan <i>Lodging Service</i>) | 55190 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 4 | <i>Homestay/</i> penginapan sejenis | 55140 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan | Kebudayaan dan Pariwisata |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | LOKASI | SEKTOR |
|----|---|----------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | PERDA | |
| 5 | Jasa Boga/Catering | 55260 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 6 | SPA | 93093 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 7 | Ketangkasan | 92424 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 8 | Bar/Café/ <i>Singing Room</i> (Karaoke) | 92428 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 9 | Restoran: Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa Restoran/Rumah Makan Non Talam | 55213 55214 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | LOKASI | SEKTOR |
|----|---|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| 10 | Usaha Rekreasi dan Hiburan (taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, kolam pemancing, gelanggang permainan, gelanggang bowling, rumah bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap): Billiar Golf Bowling Renang Sepak Bola | 92411 92412 92413 92414 92415 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |
| | Tenis Lapangan Kebugaran/Fitness <i>Sport Centre</i> Kegiatan Olahraga lainnya | 92416 92417 92418 92419 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 11 | Biro Perjalanan Wisata (<i>Outbound Tour Operator</i>): | | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 84 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | LOKASI | SEKTOR |
|----|---|-------|--|--------|--------|
| | Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Empat | 63411 | | | |
| | Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Tiga | 63412 | | | |
| | Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Dua | 63413 | | | |
| | Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Satu | 63414 | | | |
| | Jasa Biro Perjalanan Wisata Non Cakra | 63415 | | | |

12 Profesional ...

| | | | | | |
|----|---|-------|--------------|--|---------------------------------|
| 12 | <i>Professional Convention Organizer (PCO)</i> | 63440 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 13 | Usaha Jasa Impresariat | 63450 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 14 | Pengusahaan Obyek Wisata Budaya: Museum Swasta | 92322 | Maksimal 50% | tidak bertentangan dengan PERDA | Kebudayaan dan Pariwisata |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | LOKASI | SEKTOR |
|----|--|-------|--|-------------------------------------|-----------|
| | Peninggalan Sejarah yang dikelola swasta | 92324 | | | |
| 15 | Hospital Services/ Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta | 85113 | Maksimal 65% | Medan dan Surabaya | Kesehatan |
| 16 | Nursing Services | 85191 | Maksimal 49% | Medan dan Surabaya | Kesehatan |
| 17 | Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik) | 85193 | Maksimal 49% | Ibukota Provinsi di Indonesia | Kesehatan |

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

h. Perizinan ...

h. Perizinan Khusus dan Kepemilikan Modal

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING | SEKTOR |
|----|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | Pengusahaan Obyek Wisata Alam di luar Kawasan Konservasi | 92334 | Maksimal 50% | Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | Industri Bahan Baku untuk Bahan Peledak (Amonium Nitrat) | 24114 | Maksimal 49% | Pertahanan |
| 3 | Industri Bahan Peledak dan Komponennya untuk Keperluan Industri | 24292 | Maksimal 49% | Pertahanan |
| 4 | Usaha Perkebunan dan/atau Industri Pengolahan Hasil Kelapa Sawit diatas 25Ha dan/atau diatas Kapasitas Tertentu Sesuai Dengan Permentan No. 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya | 01134/ 15141 | Maksimal 95% | Pertanian |

Catatan:

1. Persyaratan Beroperasi/Berproduksi Komersial Dapat Diperoleh Pada Sektor yang Terkait Dengan Bidang Usaha yang Bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

i. Modal ...

i Modal Dalam Negeri 100% dan Perizinan Khusus

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | SEKTOR |
|----|--|-------|------------|
| 1 | Produksi Senjata, Mesiu, Alat Peledak dan Peralatan Perang | 29270 | Pertahanan |

Catatan:

1. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso